

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pemerintah daerah Indonesia menjadi lembaga yang masih tinggi tingkat korupsinya sehingga mengakibatkan kinerja pemerintah dalam melayani publik menurun dan menimbulkan kerugian karena pengelolaan sumber daya yang tidak tepat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, audit internal pemerintah, dan penegakan hukum terhadap tingkat korupsi dengan sumber daya alam sebagai pemoderasinya. Setelah dilakukannya serangkaian proses penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pelimpahan kekuasaan yang diberlakukan oleh pusat kepada daerah berbanding lurus dengan tingginya tingkat korupsi di pemerintah daerah. Temuan tersebut dapat disebabkan oleh pelimpahan kekuasaan yang diberikan oleh pusat kepada daerah tersebut justru dijadikan kesempatan dan peluang bagi para pejabat pemerintah yang memiliki niat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri.
- b. Audit internal pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya audit internal pemerintah tidak memberikan pengaruh yang efektif terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh audit internal pemerintah belum dapat menjadi langkah yang efektif dalam mengurangi tingkat korupsi di lingkup pemerintah daerah.
- c. Penegakan hukum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil temuan ini mengungkapkan bahwa adanya

penegakan hukum tidak memberikan pengaruh yang efektif terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Temuan tersebut dapat disebabkan oleh data penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini hanya terkait jumlah penindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Sedangkan penindakan aparat penegak hukum belum cukup untuk dapat dijadikan sebagai langkah yang efektif dalam mengurangi adanya tindakan korupsi di pemerintah daerah.

- d. Sumber daya alam sebagai pemoderasi desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi tingkat korupsi memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil temuan ini mengungkapkan bahwa kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah dapat mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh kebijakan desentralisasi fiskal sebagai pemicu tingginya tingkat korupsi. Temuan tersebut dapat disebabkan oleh melimpahnya sumber daya alam dapat mendorong adanya lembaga-lembaga demokrasi yang kuat sehingga dapat membuat pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami peneliti selama melakukan proses penelitian ini terjadi pada data penelitian untuk variabel tingkat korupsi dan penegakan hukum. Peneliti menggunakan data kasus korupsi dan jumlah pelaku pelanggaran-pelanggaran yang diputuskan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019. Sedangkan, tidak semua kasus dan pelanggaran yang ditetapkan berkekuatan hukum tetap tahun 2019 tersebut merupakan kasus dan pelanggaran yang benar-benar terjadi pada tahun 2019. Terdapat kasus dan pelanggaran yang terjadi sebelum tahun 2019, namun baru diputuskan pada tahun 2019 karena kasus dan pelanggaran tersebut baru terungkap di tahun 2019 atau proses hukum dari kasus dan pelanggaran tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama.

5.3 Saran

a. Saran Teoritis

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tingkat korupsi di Indonesia dengan menggunakan data yang menyatakan bahwa kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun yang ingin diteliti sehingga datanya benar-benar menggambarkan tingkat korupsi pada tahun tersebut. Peneliti juga dapat menambahkan pengaruh faktor politik, karakteristik pemerintah daerah, sumber daya manusia, dan faktor lainnya pada penelitian selanjutnya.

b. Saran Praktis

1) Pemerintah

Penelitian ini mengharapkan pemerintah pusat dapat lebih mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Diperlukan peraturan yang tegas agar kebijakan tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah sendiri perlu melakukan tindakan, baik preventif maupun koersif yang dapat mencegah terjadinya korupsi dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan publik.

2) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP)

Penelitian ini mengharapkan BPKP sebagai badan pemeriksa dan pengawas intern untuk semakin optimal dalam melakukan audit dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pemanfaatan anggaran negara dan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya indikasi praktik korupsi.

3) Lembaga Hukum

Penelitian ini mengharapkan lembaga hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional melakukan perbaikan kualitas kelembagaannya secara menyeluruh dengan memperkuat supremasi hukum, peningkatan kualitas undang-undang dan memperbanyak jumlah

lembaga hukum yang dapat menindaklanjuti tindak pidana korupsi di setiap ibukota kabupaten di Indonesia.